



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2014**

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu adanya penetapan pengelola kegiatan pada masing-masing Bagian;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 khususnya pada lampiran ke 10 (Sepuluh) Nomor urut 12 (Dua Belas) pada bagian Umum Setda, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang an Jasa Milik Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah keputusan bupati nomor 38 tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 khususnya pada lampiran ke 10 (Sepuluh) Nomor urut 12 (Dua Belas) pada bagian Umum Setda sebagai berikut :

Program Kegiatan	Sumber dana	Jumlah dana	PPTK	Bendahara kegiatan
Pembuatan Taman pada Rumah Jabatan Bupati	PAD/DDL	Rp. 100.000,	Djemy O Karompis, S.Sos	Otniel Yagoli, SE

- KEDUA : Pengelola Kegiatan dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola kegiatan berdasarkan DPA-SKPD sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Yahukimo berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku serta menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati ;
- KETIGA : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan tepat pada waktu yang dtentukan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka keputusan Bupati Yahukimo Nomor 38 Tahun 2014 pada Lampiran ke 10 (Sepuluh) Nomor Urut 12 (Dua Belas) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 75 TAHUN 2014**

**T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2014**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu adanya penetapan pengelola kegiatan pada masing-masing Bagian;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 khususnya pada lampiran ke 10 (Sepuluh) Nomor urut 12 (Dua Belas) pada bagian Umum Setda, dipandang tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang an Jasa Milik Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah keputusan bupati nomor 38 tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014 khususnya pada lampiran ke 10 (Sepuluh) Nomor urut 12 (Dua Belas) pada bagian Umum Setda sebagai berikut :

Program Kegiatan	Sumber dana	Jumlah dana	PPTK	Bendahara kegiatan
Pembuatan Taman pada Rumah Jabatan Bupati	PAD/DDL	Rp. 100.000,	Djemy O Karompis, S.Sos	Otniel Yagoli, SE

- KEDUA : Pengelola Kegiatan dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola kegiatan berdasarkan DPA-SKPD sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Yahukimo berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku serta menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati ;
- KETIGA : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan tepat pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Yahukimo Nomor 38 Tahun 2014 pada Lampiran ke 10 (Sepuluh) Nomor Urut 12 (Dua Belas) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 08 Agustus 2014

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
4. Yang bersangkutan.

